

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Pengendalian Internal merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan pemerintah. Sistem Pengendalian Internal sangat diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan digunakan secara efisien dan efektif, terhindar dari kecurangan, pengamanan pada aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Hama et al., 2021).

Penerapan Pengendalian Internal pada suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik, apabila pengendalian tersebut selalu berpedoman pada suatu pengendalian internal yang baik dan sehat. Dimana pengendalian tersebut tidak menjadi beban yang memperlambat pencapaian tujuan perusahaan, tetapi justru pengendalian tersebut harus menjadi alat bantu bagi manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien (Akhmad et al., 2018). Salah satu contoh penerapan sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian pada sistem realisasi anggaran pada pemerintah daerah. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran belanja daerah. Hal ini mencakup penyimpangan dalam alokasi dana, penundaan proyek, serta penyelewengan anggaran yang berdampak negatif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Pradesyah et al., 2021).

Pada tahun 2023 kasus penyelewengan dana dalam pembangunan jalan di tana toraja mengungkapkan bahwa ditemukan penyimpangan anggaran. Dana proyek dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 300 juta. Dalam rangka menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara maka pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan perlu diterapkan (Mentu & Sondakh, 2016). Salah satu pemeriksa keuangan negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPK telah menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagai pengganti dari SPKN yang ditetapkan sebelumnya melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

SPKN merupakan standar untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan kata lain, pemeriksa, baik pemeriksa BPK, akuntan publik, atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK wajib memedomani standar pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam SPKN (Andi Kusnadi et al., 2022).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Peneliti memilih Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai objek penelitian, yaitu BAPPEDA Sumatera Barat yang merupakan salah satu pelaksana keuangan daerah yang merupakan bagian keuangan negara yang dikelola Pemerintah Provinsi sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan memerlukan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan, maka Sistem Pengendalian Internal diselenggarakan di lingkungan pemerintah secara menyeluruh (Bappeda, 2023).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, setiap lapisan pemerintahan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Penyelenggaraan Pengendalian Internal tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Bappeda, 2023).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi realisasi anggaran belanja daerah. BAPPEDA Sumatera Barat perlu memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik untuk memastikan bahwa realisasi tersebut dilakukan sesuai dengan pencapaian visi misi. Sistem pengendalian internal harus memastikan upaya BAPPEDA untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif, BAPPEDA dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja daerah, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan pengelolaan dana publik.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan panduan praktis bagi BAPPEDA dan lembaga sejenis dalam meningkatkan kinerja mereka dalam hal

pengelolaan anggaran dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini tentunya BAPPEDA Sumatera Barat telah memiliki sistem yang baik dalam melakukan realisasi anggaran belanja daerah (Bappeda, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA REALISASI ANGGARAN BELAJA DAERAH OLEH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA BARAT.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal di atas, Penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan pelaporan Realisasi Anggaran yang di terapkan oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Realisasi Anggaran belanja daerah oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat ?
3. Apa saja kendala dalam penerapan pengendalian internal pada realisasi anggaran belanja daerah oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan pengendalian internal terhadap realisasi anggaran belanja daerah oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengevaluasi kendala apa saja yang terjadi pada pengendalian internal terhadap realisasi anggaran belanja daerah oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini bagi Penulis, Instansi dan bagi Universitas adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Sistem Pengendalian Internal terhadap realisasi anggaran belanja daerah.
2. Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan perkuliahan dan menambah pengalaman serta pengetahuan, wawasan di lingkungan kerja.
3. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Andalas.
4. Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi, memperoleh keterampilan dan kreatifitas dalam lingkungan kerja.

b. Bagi Instansi

1. Sebagai sarana untuk menjembatani perusahaan untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam bidang akademis maupun non akademis.
2. Sebagai gambaran bagi instansi untuk menilai kinerja mahasiswa magang, sehingga sewaktu-waktu dapat merekrut mahasiswa tersebut secara langsung.

c. Bagi Universitas

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan dan menambah perbendaharaan referensi tugas akhir Perpustakaan Universitas Andalas.

### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang dilakukan di BAPPEDA yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No 1, Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat (26222) Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Kegiatan magang berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan penulis memperkirakan waktu pelaksanaannya pada bulan Januari hingga Maret 2024.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

1. Observasi

Melakukan observasi langsung terhadap proses realisasi anggaran belanja daerah yang dilakukan BAPPEDA. Hal ini dapat membantu dalam memeriksa secara langsung bagaimana sistem informasi akuntansi diterapkan dalam praktik.

2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan pegawai BAPPEDA yang terlibat dalam proses realisasi anggaran belanja daerah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sistem informasi akuntansi yang digunakan.

3. Literatur

Melakukan pencarian data dengan menelusuri sumber-sumber tulisan, mengumpulkan sejumlah buku, data pustaka, membaca dan mencatat, serta

mengolah bahan penelitian sebagai bahan rujukan dalam pembahasan Tugas Akhir.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan ini, tujuan dan manfaat magang serta metode dan sistematika penulisan dari laporan ini.

### **Bab II : Landasan Teori**

Berisi landasan teori yang berisikan tentang pengertian Sistem Pengendalian Internal, Pengertian COSO, komponen-komponen pengendalian internal, keterbatasan sistem pengendalian internal, realisasi anggaran dan belanja daerah.

### **BabIII : Gambaran Umum Perusahaan**

Berisikan gambaran umum mengenai instansi yang terdiri dari sejarah singkat instansi, visi dan misi instansi, budaya instansi, dan struktur organisasi.

### **Bab IV : Pembahasan**

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai sistem pengendalian yang diterapkan dan kendala dalam penerapan serta prosedur realisasi anggaran belanja daerah.

### **Bab V : Penutup**

Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran tentang kegiatan penelitian yang penulis lakukan.